



**LAPORAN SEMESTER I PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT
TAHUN ANGGARAN 2025**



**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT
TAHUN 2025**



**LAPORAN SEMESTER I PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT
TAHUN ANGGARAN 2025**



**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Inspektorat berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. Inspektorat memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Seiring dengan berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan Semester I Tahun 2025, Inspektorat Daerah Provinsi NTT menyusun Laporan Semester I yang berisi rangkuman informasi atas gambaran pelaksanaan program dan kegiatan serta perkembangan dan hasil yang dicapai dalam satu semester. Laporan semester diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pengawasan internal serta peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

1.2 Dasar

1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:82/KEP/HK/2025, tanggal 03 Maret 2025 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
2. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 Nomor: DPPA/A.2/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 12 Juni 2025.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1. Memberikan informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Semester I Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan informasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam evaluasi dan pengambilan keputusan.

1.4 Tugas dan Fungsi Inspektorat

a) Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

b) Fungsi

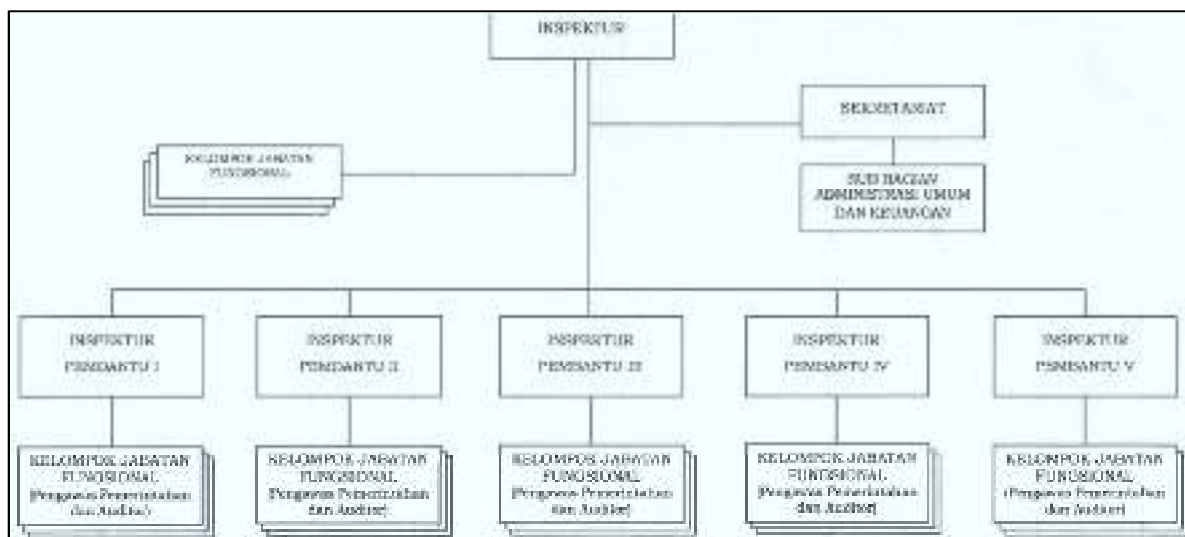
Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

- ❖ **Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur;**
- ❖ **Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, membawahi:**
 - Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- ❖ **Inspektur Pembantu I, membawahi:**
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.
- ❖ **Inspektur Pembantu II, membawahi:**
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.
- ❖ **Inspektur Pembantu III, membawahi:**
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.
- ❖ **Inspektur Pembantu IV, membawahi:**
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.
- ❖ **Inspektur Pembantu V, membawahi:**
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.



1.6 Sistematis Penyajian

Laporan Semester I secara umum menginformasikan capaian pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada semester I Tahun 2025. Membandingkan antara realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan dengan rencana kerja sebagai tolak ukur keberhasilan, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan pelaksanaan program kegiatan dan Sub kegiatan.

Sistematika penyajian Laporan Semester I Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas kondisi umum, dasar, tujuan dan sasaran serta tugas dan fungsi dan struktur organisasi serta sistematika penyajian.
- Bab II Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2025
- Bab III Akuntabilitas Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, menggambarkan rencana kerja tahun 2025 dan realisasi kegiatan semester I Tahun 2025.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan Laporan Semester I Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang perlukan bagi perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan di Semester II.

BAB II

PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

2.1 Rencana Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dan Realisasi Anggaran Inspektorat

Pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Inspektorat memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Kerja pada Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT meliputi program sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp14.075.010.394,00

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp438.380.000,00
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp120.000.000,00
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD dengan anggaran sebesar Rp90.000.000,00
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP dengan anggaran sebesar Rp50.000.000
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp87.600.000,00
 - e. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp90.780.000,00

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp11.735.179.834,00
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp11.479.699.834,00
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp80.000.000,00
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp528.760.000,00
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp80.000.000,00
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp448.760.000,00
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp203.038.320,00
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp23.000.000,00
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp55.000.000,00
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp4.038.320,00
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran sebesar Rp33.000.000,00
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp88.000.000,00
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp158.400.000,00
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp158.400.000,00
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp611.290.240,00
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,00
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp210.000.000,00
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,00

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp351.290.240,00
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp379.962.000,00
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp190.000.000,00
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp1.660.000,00
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp99.962.000,00
- 8. Kegiatan Fasilitas Keprotokolan dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,00
 - Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,00

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp3.638.327.731,00

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran sebesar Rp3.137.717.731,00
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.886.645.731,00
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp954.000,00
 - c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja dengan anggaran sebesar Rp126.320.000,00
 - d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp820.271.000,00
 - e. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp303.527.000,00
- 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran sebesar Rp500.610.000,00
 - a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan anggaran sebesar Rp90.000.000,00
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran sebesar Rp410.610.000,00

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran sebesar Rp3.350.300.838,00

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp1.883.025.468,00
 - a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp1.326.192.000,00
 - b. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp556.833.468,00
2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran sebesar Rp1.467.275.370,00
 - a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp273.527.000,00
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan anggaran sebesar Rp519.567.000,00
 - c. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan anggaran sebesar Rp674.181.370,00

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. Maka setiap tahun setiap pimpinan perangkat daerah sesuai arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, wajib menandatangani perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun rincian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	1. Persentase Obyek Pemeriksaan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	100
		2. Opini BPK	WTP
		3. Presentase Pendampingan dan Asistensi Pada Perangkat Daerah Provinsi	100

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
a.	Belanja (Program)	Rp. 20.948.705.379,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 13.652.236.810,-	Realisasi minimal 90%
	2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.593.819.561,-	Realisasi minimal 85%
	3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 3.702.649.008,-	Realisasi minimal 85%
b.	Pendapatan	Rp. -	-
	Jumlah Belanja	Rp. 20.948.705.379,-	Realisasi minimal 85%
2.	APBN		
a.	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)		
	1.	Rp. -	-
b.	Tugas Pembantuan		
	1.	Rp. -	-
	Jumlah Tugas Pembantuan+Jumlah Dekonsentrasi	Rp. -	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Semester I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian program, kegiatan dan Sub kegiatan serta anggaran yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan laporan semester I adalah pengukuran realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan serta anggaran dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai. Pengukuran tersebut dimaksud sebagai hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

3.1 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Semester I Tahun 2025 sesuai PKPT Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan Semester I Tahun 2023 sesuai Program Kerja Pengawasan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Program Kerja Pengawasan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
A	Audit / Pemeriksaan					
1.	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan PD Lingkup Pemda NTT (Semester II TA.2023 dan semester I 2024-10 PD Resiko Tinggi, 20 PD Resiko Sedang, 11 PD resiko rendah)	41		41		
2.	Pemeriksaan Fisik Dana APBD Provinsi NTT (21 Kabupaten + Badan Penghubung)	22		19		Sudah dilaksanakan Kecuali Lembata, Kota Kupang dan Sabu raijua yang tidak dilaksanakan
3.	Pemeriksaan Serentak Potensi Pendapatan (22 Kab/Kota)	22				
4.	Pemeriksaan dengan tujuan	40		10		Jaspel, Sertijab

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
	tertentu/kasus/khusus Tingkat Provinsi					6,Kelistrikan, ESDM
5.	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/kasus/khusus Tingkat Kabupaten	37				
6.	Probity Audit	6		5		Mei 2025
7.	Audit BUMD	1				
8.	Audit kinerja berbasis risiko/Kepatuhan	10		2		Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan (Audit Kepatuhan), Bapperida
9.	Uji petik lapangan terhadap paket dari DAK fisik	2				
10.	Pemeriksaan lapangan terhadap paket DAU SG (22 Kabupaten/Kota)	22				
B.	Reviu/Survei/Monitoring dan Evaluasi					
1.	Reviu LPPD Provinsi	1		1		
2.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1		1		
3.	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD, RKPD Perubahan, KUA PPAS Murni dan Perubahan, RPJMD)	5		2		RKPD Perubahan 2025, RPJMD
4.	Reviu penyerapan anggaran	4		1		Triwulan I
5.	Reviu Pajak	1		1		
6.	Reviu pengadaan barang jasa (PBJ)	1		1		
7.	Reviu risiko fraud	1		1		
8.	Reviu Manajemen ASN	1				
9.	Reviu DAU spesifik grant	2				
10.	Reviu pelayanan publik	3				Sektor perijinan, kesehatan dan pendidikan
11.	Reviu BMD	1				
12.	Reviu DAK Fisik	1				Dilaksanakan Juli 2025
13.	Evaluasi resiko	1				
14.	Evaluasi peyelenggaraan Pemerintah Daerah 22 Kabupaten/Kota	22		22		

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
15.	Evaluasi program unggulan/strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1		1		
16.	Monitoring dan evaluasi SPIP	41		41		
17.	Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Dana Desa (13 Kabupaten)	13				
18.	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1				
19.	Monev IEPK	1				
20.	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas (ZI)	1				
21.	Penilaian SPIP terintegrasi	1		1		
22.	Penanganan benturan kepentingan	1				
23.	Penilaian Kapabilitas APIP	1				
24.	Penilaian Zona Integritas (ZI)	1				
25.	Penilaian manajemen resiko	1		1		
26.	Telaahan Sejawat antar Irban	1		1		
27.	Kegiatan MCP KPK RI	4		1		Monev MCP Triwulan I
28.	Quality Assurance SPIP Terintegrasi	39		39		
29.	Penanganan Laporan Gratifikasi	1				
30.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1		1		Lanjutan Perhitungan Kerugian Negara Dugaan atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMP Negeri 3 Kupang. Dikeluarkan di Kupang
31.	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA dan CaLK serta Penutupan BKU	1				

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
C.	Rapat/Koordinasi / Pembinaan/ Supervisi Pengawasan					
1.	Supervisi Pengawasan	22				
2.	Koordinasi Tingkat Nasional	1				
3.	Publikasi Pengawasan	1				
4.	Penyusunan laporan evaluasi capaian kinerja pejabat Gubernur	1				
5.	Pendampingan Tim BPK	1				
D.	Peningkatan Kapabilitas APIP					
1.	Diklat penjenjangan pejabat fungsional auditor	4		4		Penjenjangan Auditor madya 4 org
2.	Diklat penjenjangan pejabat PPUPD	2				
3.	Diklat penjenjangan perencana	1				
4.	Diklat teknis substantif lainnya	12		5		FRMP 3 orang, 2 orang (Pak Lukas dan pak Hendro)
5.	Narasumber Kegiatan	5		1		Sosialisasi manajemen resiko 14 Feb 2025
		407		203		

Sumber : Data Inspektorat Daerah Provinsi NTT TA. 2025

3.2. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2025 dan realisasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

No.	Program/Kegiatan	Dana DPPA	Realisasi	Sisa Dana	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.075.010.394,00	6.017.226.269,00	8.057.784.125,00	42,75
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	438.380.000,00	101.138.400,00	337.241.600,00	23,07
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.735.179.834,00	5.230.754.040,00	6.504.425.794,00	44,57
	Administrasi Kepegawaian Daerah	528.760.000,00	185.493.000,00	343.267.000,00	35,08
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.038.320,00	99.017.600,00	104.020.720,00	48,77
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.400.000,00	5.070.000,00	153.330.000,00	3,20
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.290.240,00	274.295.519,00	336.994.721,00	44,87
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.962.000,00	121.457.710,00	258.504.290,00	31,97
	Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000,00			0,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.638.327.731,00	1.073.277.750,00	2.565.049.981,00	29,50
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.137.717.731,00	863.630.250,00	2.274.087.481,00	27,52
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	500.610.000,00	209.647.500,00	290.962.500,00	41,88
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.350.300.838,00	1.437.937.986,00	1.912.362.852,00	42,92
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.883.025.468,00	1.355.922.686,00	527.102.782,00	72,01
	Pendampingan dan Asistensi	1.467.275.370,00	82.015.300,00	1.385.260.070,00	5,59
Jumlah :		21.063.638.963,00	8.528.442.005,00	12.535.196.958,00	40,49

3.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	1. Persentase Obyek Pemeriksaan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	101,54%	100 %	54,21 %
		2. Opini BPK	WTP	WTP	WTP
		3. Presentase Pendampingan dan Asistensi Pada Perangkat Daerah Provinsi	103%	100%	30 %

3.4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan sesuai DPPA Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai DPPA Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025. (Lampiran 1)

BAB III PENUTUP

Laporan Semester I merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan serta anggaran Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Januari sampai dengan Juni 2025 yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atau pelaksanaan sasaran suatu organisasi yang ditetapkan sebelumnya. Laporan Semester I diharapkan menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan pada masa yang akan datang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja berikutnya maka beberapa rekomendasi atau langkah-langkah yang diperlukan adalah :

- a. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan media teknologi informasi yang tersedia pada Inspektorat Provinsi NTT;
- c. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi NTT.

Kupang, Agustus 2025

Inspektur,



Stefanus F. Halla, ST., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP.19730105 200012 1 004

Lampiran I (Output Program/Kegiatan) Inspektorat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran	Uraian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8
Program	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.075.010.394,00					
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	438.380.000,00					
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	2	50,00
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	90.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100,00
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0,00
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.600.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	4	133,33
Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.780.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	6	50,00
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.735.179.834,00					
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.479.699.834,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89	Orang/bulan	89	100,00
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175.480.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	6	50,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran	Uraian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	80.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	6	42,86
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	528.760.000,00					
Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	0,00
Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	448.760.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	4	20,00
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.038.320,00					
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka	1	Paket	1	100,00
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100,00
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.038.320,00	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	0	0,00
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material	33.000.000,00	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1	100,00
Sub Kegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	88.000.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	6	50,00
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.400.000,00					
Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.400.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	13	260,00
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.290.240,00					

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran	Uraian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	6	50,00
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	6	50,00
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	0	0,00
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.290.240,00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	6	50,00
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.962.000,00					
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9	Unit	9	100,00
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	15	100,00
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.962.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	Unit	1	100,00
Kegiatan	Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000,00					
Sub Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1	Laporan	0	0,00
Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.638.327.731,00					
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.137.717.731,00					
Sub Kegiatan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.886.645.731,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	236	Laporan		0,00
Sub Kegiatan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	954.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Laporan	0	0,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran	Uraian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8
Sub Kegiatan	Reviu Laporan Kinerja	126.320.000,00	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	7	Laporan	5	71,43
Sub Kegiatan	Reviu Laporan Keuangan	820.271.000,00	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	93	Laporan	9	9,68
Sub Kegiatan	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	303.527.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4	Laporan	27	675,00
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	500.610.000,00					
Sub Kegiatan	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	90.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Laporan	1	50,00
Sub Kegiatan	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	410.610.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertent	39	Laporan	10	25,64
Program	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.350.300.838,00					
Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.883.025.468,00					
Sub Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.326.192.000,00	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	38	Rekomendasi	20	52,63
Sub Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	556.833.468,00	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	45	Rekomendasi	20	44,44
Kegiatan	Pendampingan dan Asistensi	1.467.275.370,00					
Sub Kegiatan	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	273.527.000,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	39	Perangkat Daerah	39	100,00
Sub Kegiatan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	519.567.000,00	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korups	22	Kegiatan	1	4,55

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran	Uraian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
	2	3	4	5	6	7	8
Sub Kegiatan	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	674.181.370,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	39	Perangkat Daerah	39	100,00
Total				809		354	43,76